

PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGIK UNTUK PARTAI POLITIK PADA ERA DEMOKRATISASI: TANTANGAN, PERMASALAHAN DAN PROSPEK

Tatang Sudrajat

Dosen Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung
e-mail: id.tatangsudrajat@gmail.com

Abstrak

Keberadaan parpol pada negara demokrasi dan bagi demokratisasi dipandang sangat penting. Demikian pula di Indonesia yang saat ini tengah menapaki era konsolidasi demokrasi sangat bertumpu kepada kinerjanya yang semakin andal sebagai pilar demokrasi. Dengan metode penelitian deskriptif-eksploratif, pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dokumenter dan kepustakaan terungkap bahwa keberadaan strategi yang tepat sebagai respon terhadap perkembangan lingkungan dipandang sangat menentukan bagi pelaksanaan fungsinya guna mendorong lahirnya sosok parpol yang berkeunggulan kompetitif. Penerapan manajemen strategik dalam setiap gerak langkah parpol masih dihadapkan kepada berbagai tantangan dan permasalahan, baik internal maupun eksternal. Rekomendasinya antara lain agar parpol selalu responsif dan adaptif terhadap setiap gerak perkembangan lingkungan; revisi terhadap visi dan misi organisasi yang tergambar pada tujuan, fungsi atau program serta aspek organisasi lainnya yang termuat dalam anggaran dasarnya perlu terus dilakukan; peningkatan kualitas anggota atau kader parpol, termasuk yang dipersiapkan menempati jabatan publik merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan; serta evaluasi terhadap berbagai langkah organisasi dalam kerangka manajemen strategik harus terus menerus dilakukan.

Kata Kunci: Manajemen Strategik, Partai Politik, Demokratisasi

The Application Of Strategic Management To A Political Party In The Era Of Democratization: The Challenge, Problem And Prospect

Abstract

The existence of political parties in a democratic state and also for democratization is considered very important. Similarly in Indonesia, which is currently treading very democratic consolidation era, relying on the performance is more reliable as a pillar of democracy. With the method of descriptive-exploratory research, qualitative approach and data collection techniques documentary and literature revealed that the presence of appropriate strategies in response to environmental developments deemed crucial for the implementation of its functions in order to encourage the birth of political parties with competitive advantages. The application of strategic management in every move of political parties is still faced with various challenges and problems, both internal and external. Recommendations of this study is that political parties are always responsive and adaptive to every movement of environmental developments; revision of the vision and mission of the organization is reflected on the purpose, function or program as well as other organizational aspects contained in its charter needs to be done; improving the quality of members or of political parties, including those prepared occupy public office is something that is absolutely necessary; and evaluation of the various steps within the framework of the strategic management organizations should continue to be done.

Keywords: Strategic Management, Political Parties, Democratization

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak tahap kedua pemungutan suaranya akan digelar pada 15 Februari 2017, dan salah satu isu yang mencuat ke permukaan adalah deparpolisasi. Karena itu, fenomena menarik terkait dengan sosok dan kiprah partai politik (parpol), di tengah suasana masih kentanya euforia kebebasan sebagai buah dari reformasi politik lebih dari 18 tahun silam, adalah

keprihatinan yang amat dalam terhadap krisis kredibilitas yang menimpa dirinya. Berbagai predikat tak sedap dialamatkan pada salah satu lembaga pilar demokrasi ini yang penyebabnya karena ulah sebagian kader/anggotanya, khususnya mereka yang tengah duduk di kursi parlemen, di pusat maupun daerah, serta yang menjabat pimpinan daerah (kepada daerah dan wakil kepala daerah) di berbagai pelosok tanah air.

Padahal sejatinya justru kita patut mensyukuri bahwa telah hidup di suatu era pemerintahan yang memberikan kebebasan secara fundamental kepada warga negara dalam berbagai segi kehidupan. Kondisipolitik ini memang tidak mungkin terpisahkan dari membuncahnya kesadaran dan pemahaman bersama sebagian besar komponen bangsa proreformasi yang telah meruntuhkan rezim Orde Baru dan telah membawa perubahan sangat besar dalam perparpolan di negeri ini. Sejarah mencatat bahwa keran keterbukaan dalam kemas demokratisasi dan kemerdekaan berekspresi, telah mendorong kebergairahan sebagian elemen masyarakat dalam era ini, diantaranya dengan antusiasnya mendirikan parpol. Salah satu indikasi yang tidak terbantahkan adalah data yang fantastis secara kuantitatif berupa parpol sebagai badan hukum yang jumlahnya ratusan, dan kemudian diverifikasi oleh penyelenggara pemilu menjadi parpol peserta pemilu selama kurun waktu era reformasi yaitu 48 parpol (pemilu 1999), 24 (pemilu 2004), 38 (pemilu 2009) dan 12 (pemilu 2014).

Fakta ini tentu saja menorehkan catatan positif bagi Indonesia yang masih sedang berkonsolidasi demokrasi. Namun demikian, hal ini patut pula diacungi pertanyaan mendasar tentang bagaimana kontribusinya bagi kemaslahatan dan kepentingan bangsa yang lebih besar. Merupakan suatu keniscayaan bahwa dalam sebuah negara yang mengklaim diri sebagai demokrasi, keberadaan dan fungsionalisasi perannya akan menjadi parameter kunci, apakah dirinya hanya sekedar *asesoris atribut* sistem politik demokrasi atau benar-benar telah bermakna fungsional bagi kepentingan publik. Sejarah negeri ini dalam berparpol yang telah lebih dari 70 tahun dengan segala riak dan dinamikanya tentu bakal menjadi fenomena menarik untuk terus menerus dikaji.

Dalam konteks inilah, relevansi sosok dan kiprahnya bagi demokratisasi dan pembangunan bangsa ke depan akan bersinggungan dengan kerangka pembangunan politik yang sedang terus dipersiapkan. Hal inipun sekaligus akan menjadi fokus bahasan yang selalu menarik, sekurang-kurangnya karena beberapa hal. Pertama, sebagai bangsa merdeka dengan segudang pengalaman berparpol, tentu sudah seharusnya menjadi catatan berharga untuk kepentingan penataan kehidupan politik hari

ini dan di masa depan. Apalagi bila diingat bahwa “tradisi” menjadikan parpol sebagai institusi modern untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa sebenarnya sudah tersemai sejak awal abad ke 20, yaitu pada saat bangsa ini masih terjajah. Kedua, mencermati beberapa ketentuan undang-undang dan praktik kenegaraan selama ini, dapat dikatakan nyaris telah mewujud dengan sempurna apa yang dinamakan partitokrasi. Dalam arti, demikian sangat dominannya peran parpol dalam proses kenegaraan, diantaranya tampak dari pembentukan hampir sebagian besar kelembagaan negara termasuk lembaga-lembaga *quasi* negara (*state auxiliary agencies*) nyaris semuanya melibatkan kewenangan parpol melalui kepanjangan tangannya yaitu para legislator yang berada di parlemen.

Perkembangan lingkungan strategis organisasi parpol saat ini tentu saja sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan kondisi politik di awal reformasi. Dalam konteks ini, segenap jajaran parpol, khususnya yang berada pada *level top management* dituntut merancang dan menetapkan keputusan strategis sehingga sebagai organisasi benar-benar dirinya dapat mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif. Dari perspektif manajemen strategis, bahkan tujuan akhirnya adalah agar organisasi dapat tampil dengan memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Sebagai contoh, makin diminatinya jalur perseorangan dalam pencalonan pilkada merupakan satu indikasi bahwa parpol sudah harus segera berbenah diri dengan sangat serius kalau tidak ingin ditinggalkan pemilihnya.

Dengan kata lain, saat ini yang menjadi pertanyaan sentralnya adalah strategi apa yang telah ditetapkan dan harus diimplementasikan parpol sebagai wujud nyata kontribusinya bagi konsolidasi demokrasi. Secara lebih khusus, apa yang telah dan harus diperbuatnya bagi kepentingan rakyat banyak melalui fungsionalisasi peran-peran instrumentalnya dalam konteks kepentingan publik yang luas. Karena itu, tulisan ini mengelaborasi lebih jauh tantangan, permasalahan dan prospek penerapan manajemen strategik pada parpol di era demokratisasi, dalam beberapa hal terkait dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Partai Golkar) sebagai dua kekuatan politik yang sudah sangat malang melintang dalam percaturan politik nasional.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Strategi dan Manajemen Strategik

Pada saat ini nyaris tidak ada satu pun bidang kehidupan manusia yang terlepas dari istilah strategi. Bidang-bidang seperti pendidikan, politik, bisnis, pertanian, olahraga, kebudayaan, militer dan bahkan hubungan antar bangsa merupakan beberapa contoh segi kehidupan manusia yang selalu dilekatkan strategi dalam pencapaian tujuan-tujuannya. Istilah strategi (*strategy*) menurut Salusu berasal dari kata Yunani *strategos* atau *strategus* dengan kata jamak strategi. *Strategos* berarti jenderal tetapi dalam Yunani kuno sering berarti perwira negara (*state officer*) dengan fungsi yang luas. Pada abad ke-5 SM sudah dikenal adanya *Board of Ten Strategy* di Athena, mewakili 10 suku di Yunani. Hingga abad ke-5, kekuasaan politik terutama politik luar negeri dari kelompok strategi itu semakin meluas (1996:85).

Dengan mengutip pendapat Maurice Matloff, dikemukakan lebih lanjut bahwa dalam arti sempit, strategi berarti *the art of the general* (seni jenderal). Dalam zaman Yunani kuno jenderal dianggap bertanggung jawab dalam suatu peperangan, kalah atau menang. Ia secara terus menerus membina pasukannya dengan keterampilan berperang, memahami medan peperangan, memanfaatkan peluang yang memungkinkan pasukannya memperoleh kemenangan, memberi motivasi kepada pasukannya sebelum dan sesudah berperang serta bagaimana berunding dengan penguasa logistik dan sumber daya lain. Penggunaan istilah strategi lebih memperoleh tempat di kalangan militer pada akhir abad ke-18, ketika peperangan masih relatif sederhana dan terbatas. Istilah *strategems* kala itu populer di kalangan perwira, yaitu bagaimana seorang jenderal melakukan tipu daya terhadap musuhnya, melalui rencana operasi, antara lain menggerakkan pasukan ke medan perang. Kemudian pada abad ke-19 dan 20 faktor militer telah bercampur dengan faktor-faktor politik, ekonomi, teknologi dan psikologi.

Pada saat ini istilah strategi telah digunakan secara luas bukan hanya pada organisasi bisnis/perusahaan, tetapi juga pada bidang-bidang kegiatan manusia lainnya, termasuk dalam pengelolaan kegiatan politik dan pemerintahan negara. Beberapa ahli mendefinisikan atau memberikan arti kepada strategi, diantaranya sebagai berikut:

a. Alfred D. Chandler Jr. sebagaimana dikutip Harrison (1986:8), *strategy is the determination of the basic long-term goals and objectives of the organization and the adoption of*

courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals.

- b. Cope sebagaimana dikutip Salusu (1996:89), strategi adalah pola tujuan atau sasaran yang dinyatakan sedemikian rupa yaitu yang menegaskan bisnis apa yang digeluti organisasi itu atau yang akan digeluti, dan macam apa atau akan seperti apa organisasi itu.
- c. Robbins (1990:145), *strategy was defined as including both the long-term goals of an organization plus a course of action that will provide the means toward their attainment.*
- d. Hughes (1994:60), sebagai salah satu *function of general management*, strategi ini menurutnya meliputi dua kegiatan utama yaitu *establishing objectives and priorities for the organization (on the basis of forecasts of the external environment and the organization's capacities) and devising operational plans to achieve these objectives.*
- e. Salusu (1996:101), strategi adalah suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.
- f. Ansoff dan McDonnell (1990:43), strategi adalah *is a set of decision making rules for guidance of organizational behavior.*
- g. Tangkilisan (2007:252), ditinjau dari perspektif manajemen, strategi adalah upaya pengembangan keunggulan organisasi atau institusi dalam lingkungan eksternal yang kompetitif untuk pencapaian tujuan atau sasaran organisasi.

Berdasarkan pendapat para pakar tersebut sangat jelas kiranya betapa sangat vitalnya keberadaan strategi bagi keberlangsungan hidup organisasi terutama dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan-tujuannya. Istilah *strategic management* oleh para ahli diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa istilah dengan aneka ragam penulisannya, diantaranya manajemen strategis, manajemen strategi, manajemen strategik, dan manajemen stratejik. Beberapa ahli telah mengemukakan pendapat atau definisi tentang manajemen strategik, diantaranya sebagai berikut:

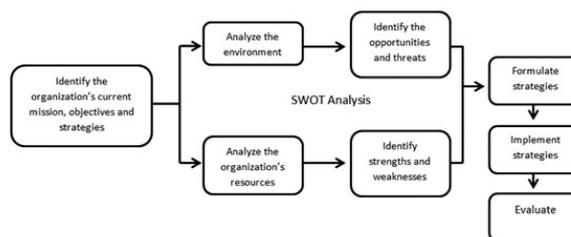
a. Siagian (1995:15), manajemen stratejik adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan

oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

- b. Arnolando C. Hax dan Nicholas S. Majluf sebagaimana dikutip Hughes (1994:172), *strategic management has, as an ultimate objective, the development of corporate values, managerial capabilities, organisational responsibilities, and administrative systems which link strategic and operational decision making, at all hierarchical level, and across all business and functional lines of authority in a firm.*
- c. David (2004:5), manajemen strategis adalah seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objektifnya.
- d. Hughes (1994:172-174), *strategic management aims to extend the strategic vision throughout all units of organisation, encompassing every administrative system. Strategic management aims to integrate the planning function with the overall management task.*
- e. Hitt (2001:6), proses manajemen strategis adalah serangkaian penuh komitmen, keputusan, dan tindakan yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk mencapai daya saing strategis dan menghasilkan di atas rata-rata.
- f. Wheelen dan Hunger (1995:3), *strategic management is that set of managerial decisions and actions that determines the long-run performance of a corporation.*

Menurut Solihin (2012:70) pada saat melakukan kegiatan manajemen strategik, para manajer perusahaan akan mengolah input yang diperoleh melalui evaluasi terhadap misi, tujuan, strategi yang dimiliki perusahaan saat ini serta analisis terhadap lingkungan internal (melalui analisis ini perusahaan akan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sumber daya perusahaan) dan analisis terhadap lingkungan eksternal (melalui analisis ini dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman). Melalui pengolahan input ini, perusahaan akan dapat merumuskan misi dan tujuan. Selanjutnya perusahaan dapat memilih alternatif strategi yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Stephen P. Robbins dan Mary Coulter sebagaimana dikutip Solihin (2012:70) menggambarkan proses manajemen strategik sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Proses Manajemen Strategik

Menurut Wheelen dan Hunger, *the process of strategic management involves four basic elements: (1) environmental scanning, (2) strategy formulation, (3) strategy implementation, and (4) evaluation and control* (1995:7). Pada level korporasi, proses manajemen strategik meliputi aktivitas mulai dari pengamatan/pemindaian lingkungan sampai evaluasi kinerja. Manajemen mengamati lingkungan eksternal untuk melihat kesempatan dan ancaman, serta mengamati lingkungan internal untuk melihat kekuatan dan kelemahan. Faktor-faktor yang paling penting untuk masa depan perusahaan disebut faktor-faktor strategis, yang diringkas dengan singkatan SWOT (*strengths/kekuatan, weaknesses/kelemahan, opportunities/kesempatan dan threats/ancaman*). Setelah mengidentifikasi faktor-faktor strategis, manajemen mengevaluasi interaksinya dan menentukan misi perusahaan yang sesuai. Langkah pertama dalam formulasi strategi adalah pernyataan misi, yang berperan penting dalam menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Perusahaan mengimplementasi strategi dan kebijakan tersebut melalui program, anggaran dan prosedur. Akhirnya evaluasi kinerja dan umpan balik untuk memastikan tepatnya pengendalian aktivitas perusahaan.

Terkait dengan rencana, sasaran dan tujuan organisasi, Barry Bozeman dan Jeffrey D. Straussman, sebagaimana dikutip Hughes (1994:180) mengemukakan bahwa *strategic management is guided by four principles: (1) concern with long term, (2) integration of goals and objectives into a coherent hierarchy, (3) recognition that strategic management and planning are not self-implementing, and most important, (4) an external perspective emphasising not adapting to the environment but anticipating and shaping of environmental change.*

Dalam praktek, proses manajemen strategik dalam pandangan David (2004:15) tidak dilakukan dengan pembagian yang jelas dan rapi. Ahli strategi tidak melewati proses ini dalam langkah-langkah yang harus diikuti

dengan tepat. Banyak organisasi melakukan rapat resmi setiap setengah tahun untuk mendiskusikan dan memutakhirkan misi perusahaan, peluang/ancaman, kekuatan/kelemahan, strategi, sasaran, kebijakan dan prestasi. Komunikasi dan umpan balik yang baik diperlukan dalam seluruh proses manajemen strategis. Untuk memperkecil dampak ketidakpastian masa depan terkait dengan keputusan yang telah diambil, menurut Siagian, perlu diperhatikan dan diperhitungkan berbagai dimensi keputusan strategik, yaitu dimensi keterlibatan manajemen puncak (*top management*), dimensi alokasi dana, sarana dan prasarana, dimensi waktu keputusan strategik, dimensi orientasi masa depan, dimensi isu strategik yang multifaset, dan dimensi lingkungan eksternal (1996:17).

Semua perusahaan menurut David mempunyai suatu strategi, bahkan sekalipun bentuknya informal, tidak terstruktur, dan sporadik. Proses manajemen strategis semakin banyak dipakai oleh perusahaan kecil, perusahaan besar, lembaga nirlaba, organisasi pemerintah, dan konglomerat multinasional. Manajemen strategis memungkinkan suatu organisasi untuk lebih proaktif ketimbang reaktif dalam membentuk masa depan sendiri; hal ini memungkinkan suatu organisasi untuk mengawasi dan mempengaruhi (ketimbang hanya memberi respons terhadap) aktivitas, dan dengan demikian dapat berusaha keras mengendalikan tujuan sendiri (2004:17-24).

Dengan mengutip pendapat Gordon Greenley, terdapat beberapa manfaat manajemen strategis menurut David (2004:19), antara lain memungkinkan mengenali, menetapkan prioritas, dan memanfaatkan berbagai peluang; menyediakan pandangan obyektif mengenai masalah manajemen; menjadi kerangka kerja untuk memperbaiki koordinasi dan pengendalian aktivitas; meminimalkan pengaruh kondisi dan perubahan yang merugikan; memungkinkan keputusan utama yang lebih baik mendukung sasaran yang telah ditetapkan; memungkinkan alokasi waktu dan sumberdaya yang lebih efektif untuk mengenali peluang; menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal diantara staf; menyediakan dasar untuk penjelasan tanggung jawab individu; memberikan dorongan untuk pemikiran ke depan; mendorong sikap yang menerima perubahan; serta memberikan tingkat disiplin dan formalitas yang tepat pada manajemen dari suatu bisnis.

Menurut David, proses manajemen strategis telah dipakai secara efektif oleh berbagai organisasi nirlaba dan pemerintah yang tak terhitung jumlahnya, seperti pramuka, palang merah, kamar dagang, lembaga pendidikan, lembaga pengobatan, fasilitas umum, perpustakaan, kantor pemerintah, dan gereja. Banyak organisasi nirlaba dan pemerintah berprestasi lebih bagus ketimbang perusahaan dan korporasi swasta dalam hal keinovasian, motivasi, produktivitas, dan manajemen strategis (2004:65). Dikemukakan lebih lanjut bahwa, ahli strategi dalam organisasi pemerintah beroperasi dengan otonomi strategis yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bekerja di perusahaan swasta. Perusahaan milik negara pada umumnya tidak dapat melakukan diversifikasi ke dalam bisnis yang tidak berkaitan atau melakukan merger dengan perusahaan lain. Ahli strategi pemerintah biasanya hanya mendapat sedikit kebebasan dalam mengubah misi organisasi atau mengubah arah sasaran. Isu strategis harus didiskusikan dan diperdebatkan dalam media dan dewan perwakilan. Isu dijadikan politik, akibatnya alternatif pilihan strategis menjadi berkurang (2004:65).

Di permukaan tampaknya manajemen strategis tidak dapat diterapkan pada organisasi pemerintah, tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Merupakan suatu penemuan bahwa karyawan pada kantor dan departemen pemerintah amat bergairah mengetahui peluang untuk berpartisipasi dalam proses manajemen strategis, dan oleh karena itu mempunyai pengaruh pada misi, sasaran, strategi, dan kebijakan organisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Jack Kotten, yang dikutip oleh Salusu (1996:39) bahwa pemerintah dan organisasi non profit dalam membuat keputusan-keputusan penting haruslah efektif secara strategik. Dalam berbagai kesempatan membuat keputusan, justru kalangan pemerintah pusat dan daerah tidak jarang mengajak kalangan bisnis dan non profit untuk turut mengambil bagian aktif.

Sejalan dengan itu, terkait dengan organisasi pemerintahan/negara, Alan Walter Steiss mengemukakan manajemen strategis kurang tampak dalam organisasi pemerintahan dan tidak bisa dibiarkan. Itulah sebabnya konsep-konsep visi strategik yang telah terbukti banyak manfaatnya dalam organisasi bisnis dapat ditiru, disempurnakan sesuai kebutuhan, dan jelas ini merupakan jaminan yang paling berharga dalam memperbaiki kualitas

manajemen dalam lingkungan pemerintahan (dalam Salusu, 1996:40).

Dengan kata lain, jelas bahwa manajemen strategik ini sangat diperlukan dalam administrasi negara sebagai suatu wujud kerjasama rasional dari sekelompok orang yang terkoordinasi dalam mencapai tujuan pemerintahan/negara yang telah ditetapkan. Salah satu institusi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan dalam kerangka administrasi negara secara luas adalah parpol sebagai salah satu elemen dari infrastruktur politik.

2. Parpol dan Demokratisasi

Dalam literatur ilmu politik dan di kalangan para penstudinya disadari betul arti penting keberadaan parpol dalam sebuah negara yang menamakan diri demokrasi. Kepentingan publik akan diperjuangkan pada lembaga-lembaga politik, khususnya parlemen oleh parpol melalui anggota-anggotanya yang terpilih dalam pemilu. Otoritas yang dimiliki sebagai anggota parlemen menjadi modal besar baginya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan publik. Mengikuti pendapat Budiardjo, parpol adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik- biasanya dengan cara konstitusional-untuk melaksanakan programnya (2008: 404).

Beberapa definisi mengenai parpol dari para sarjana, sebagaimana dikutip Budiardjo (2008:404) diantaranya menurut Carl J. Friedrich bahwa parpol adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. Tidak begitu berbeda, Sigmund Neumann mengemukakan bahwa parpol adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Pada era reformasi saat ini, parpol secara normatif didefinisikan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks relasi antara negara dengan rakyat, keberadaannya demikian sangat strategis. Meehan dkk. menyebut bahwa *political parties are instruments for channeling opinion between the general population and the government. They have the task for informing, criticizing, exhorting, depending, or attacking government. As a communication channel, the political party is open at both ends, transmitting information, and criticism from people to government and information from government to people* (1966:28). Parpol menurut Apter merupakan mata rantai yang menghubungkan publik dan pemerintah. Partai membangun koalisi kepentingan dan persuasi yang didukung oleh sebagian besar rakyat. Partai politik merupakan perantara tunggal terpenting untuk politik, daya saing, tawar menawar dan negosiasi. Partai memungkinkan para politisi tetap dekat dengan publik di satu pihak, dan menjadi sesuatu yang sangat berlainan bagi sejumlah besar orang (1996:152). Dalam kaitan dengan keberadaan kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) di masyarakat, Deutsch mengemukakan bahwa *political parties are key organizations for getting social and political results. They do so by aggregating several different interest group into a stable coalition which is strongest and more powerful than any single interest group by itself* (1995:64). Institusi ini menurut Sigmund Neumann merupakan perantara yang besar dan menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi (dalam Budiardjo, 2008:404).

Dengan demikian sangat erat hubungan keterkaitan antara eksistensi dan kinerja parpol dengan demokrasi dan pemerintahan demokratis. Telah sangat maffhum diketahui bahwa bila ditelusuri, dari akar kata "*demos*" dan "*cratos*", maka tak pelak lagi bahwa dalam negara demokrasi, keberadaan parpol sebagai wahana bagi rakyat dalam memperjuangkan aspirasinya menjadi sesuatu keniscayaan. *Key elements of a democracy menurut Michael adalah recognition of rights for individuals, consent of the people, accountability of decision makers to the people, representation, formal processes to demarcate and limit the role of decision makers* (2006: 16).

Menurut Marijan, parpol merupakan satu pilar dari demokrasi yang harus ada di dalam suatu negara modern (2010:59) atau sebagaimana dikemukakan Rodee dkk. bahwa tidak akan ada demokrasi yang efektif tanpa kompetisi partai politik (2008:219).

Secara lengkap, *the characteristics of democratic government menurut Michael* adalah: *The rule of law—the same laws and the same judicial processes apply to all citizens; Limits on government—the constraints on government action are defined, processes exist to maintain those limitations, and officials are held accountable if they are breached; The principle of representation—the people who are subject to the laws must be equally represented in the legislative process that makes those laws; The protection of individuals and property—the assumption that individuals have rights and freedoms, which include as a minimum the own property and the right to contest government decisions; The institutionalisation of the process of government – in which functions are delineated, responsibilities are defined, and the mechanisms for change, including elections, are prescribed* (2006:31).

Negara demokratis, diantara kriterianya adalah adanya hak warganegara untuk membentuk perkumpulan-perkumpulan atau organisasi yang relatif independen, termasuk parpol dan kelompok kepentingan yang bebas serta para pejabat yang dipilih selalu berasal dari proses pemilihan yang dilakukan secara jujur, setiap unsur-unsur paksaan dianggap sebagai suatu hal yang sangat memalukan (Dahl, 1982:18). Oleh karena itu, membahas apa saja yang menjadi fungsinya dalam negara demokrasi menjadi bagian penting dari pembahasan parpol secara keseluruhan.

Parpol yang benar-benar fungsional tentu akan mendorong berlangsungnya demokratisasi. Dalam pandangan Arfani, demokratisasi merupakan proses/upaya penciptaan lembaga-lembaga yang beroperasi dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan lembaga-lembaga yang menciptakan dan melanggengkan ciri-ciri demokratis suatu masyarakat (1996:xiii). Hampir semua konsep tentang demokratisasi menurut Mariana dan Caroline Paskarina, menggambarkan proses menuju demokrasi sebagai perjalanan yang panjang melalui sejumlah tahapan, yang pada dasarnya meliputi tahap jatuhnya rezim; liberalisasi; lahirnya aturan-aturan baru; dan tahap konsolidasi (pelembagaan aturan main yang baru). Pada tahap terakhir dari demokratisasi, harus terjadi pelembagaan (internalisasi) nilai-nilai dan praktik demokrasi dalam seluruh elemen negara (2008:30).

Seiring dengan gelombang demokratisasi, meminjam istilah *Huntington* sebagai sesuatu yang melekat dalam kehidupan umat manusia dan yang sudah melanda dunia (1993:13), maka jelas kiranya bahwa kehidupan parpol pun tidak mungkin dapat terlepas dari arus besar ini. Menurut Marijan, suatu negara memang relatif mudah mengalami transisi menuju demokrasi. Transisi semacam itu tidak serta merta bermakna bahwa negara itu akan secara terus menerus berada dalam kerangka demokrasi. Bila gagal melakukan konsolidasi demokrasi, bisa saja kembali ke sistem otoriter. Karena itu, semua negara yang berproses menuju demokrasi, termasuk Indonesia, selalu menghadapi masalah konsolidasi demokrasi (2010:334-335). Dikemukakan lebih lanjut bahwa demokrasi dikatakan terkonsolidasi apabila terdapat regularitas, adanya rutinitas dan kesinambungan di dalam mekanisme berdemokrasi (2010: 339).

Terkait dengan ini, Budiardjo menyebut adanya empat fungsi partai politik, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik (2008:405-410). Dalam rumusan *Ball*, *one of the most important functions of political parties is that of uniting, simplifying and stabilising the political process. Political parties provide a link between government and people. They seek to educate, instruct and activate the electorate. They use the mass media and local organizations to maintain contacts with the relatively politicaly in active and lead them to awareness and acceptance various policies* (1975:81-82). Fungsi utama parpol dalam pandangan *Surbakti* adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu (1999:116). Dikemukakan lebih lanjut bahwa fungsi-fungsi lainnya adalah sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemaduan kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik, dan kontrol politik.

Di Indonesia, secara normatif, fungsi parpol menurut Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik merupakan sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi

politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warganegara Indonesia; dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

3. Lingkungan Organisasi

Apabila ingin tampil dengan secara efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya dan memiliki keunggulan kompetitif, maka organisasi harus berinteraksi dengan setiap perkembangan lingkungan secara responsif. Tak terkecuali parpol, sehingga dirinya benar-benar dituntut untuk melakukan apa yang dalam perspektif manajemen strategik oleh Hunger dan Wheelen (1996:113) dinamakan sebagai pengamatan/pemindaian lingkungan (*environmental scanning*). Aktivitas ini merupakan salah satu tahap penting dari keseluruhan proses manajemen strategik, serta merupakan alat manajemen untuk menghindari kejutan strategis dan memastikan kesehatan manajemen dalam jangka panjang.

Kegiatan ini terdiri atas pemindaian lingkungan terhadap lingkungan eksternal perusahaan (*external environment*) dan lingkungan internal perusahaan (*internal environment*). Menurutnya lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan kerja/tugas (*task environment*) dan lingkungan sosial (*social environment*). Lingkungan internal variabel struktur (*structure*), budaya (*culture*) dan sumber daya (*resource*) organisasi perusahaan. Sejalan dengan itu, lingkungan (*environment*) menurut Robbins adalah *everything outside an organizations. The specific environment is that part of the environment that is directly relevant to the organization in achieving its goals* (1990:206). Menurut Siagian, lingkungan adalah totalitas keadaan dan faktor yang mempunyai dampak tertentu terhadap organisasi. Lingkungan yang dihadapi oleh setiap manajer tidak hanya bersifat fisik dan alamiah semata-mata, sehingga dengan demikian komponen-komponen lingkungan ini terdiri dari faktor ekonomi, faktor sosial, faktor fisik, faktor politik dan faktor teknologis (1993:30).

Dianalogikan bahwa organisasi parpol sebagai organisasi bisnis/perusahaan, maka dengan mengikuti pandangan Post dkk., *business is composed of many segments, industries, and sectors; government involves political life at the national, state, local, and increasingly, international levels; and society is composed of many segments,*

ethnic and other groups, and stakeholders (1995:5). Dikemukakan lebih lanjut bahwa *when business interacts so often and so closely with society, a shared interest and interdependence develops between a company and other groups – the organization is interacting with its stakeholders. Stakeholders are all the people and groups affected by, or that can affect, an organization's decisions, policies, and operations. The number of stakeholders and the variety of their interests can be quite large; thus, a company's decisions can become very complex* (1999:7). Hampir senada dengan itu, menurut Siagian (1995:1) setiap organisasi bisnis dihadapkan kepada dua jenis "lingkungan", yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Makin besar suatu perusahaan, atau organisasi, makin kompleks pula bentuk, jenis dan sifat interaksi yang terjadi dalam menghadapi ke dua jenis "lingkungan" tersebut. Salah satu implikasi kompleksitas itu ialah proses pengambilan keputusan yang semakin sulit dan rumit. Untuk itulah diperlukan manajemen strategik.

Post dkk. (1999:6) menyebut adanya pemangku kepentingan utama (*primary stakeholders*) bahwa *the primary involvements shape a company's strategy and the policy decisions of its managers and reveal the importance of its primary stakeholders. These stakeholders, who are critical to the company's existence and activities, include customers, suppliers, employees, and investors*. Tidak jauh beda, Siagian (1995:1) mengemukakan bahwa secara internal, manajemen dihadapkan kepada tuntutan dan pemuasan kepentingan berbagai pihak, pertama; para manajer madya dan manajer tingkat rendah, kedua; para pemegang saham, dan ketiga; para karyawan dan karyawan organisasi.

Selain pemangku kepentingan utama/primer, Post dkk. juga menyebut adanya pemangku kepentingan sekunder (*secondary stakeholders*). Dikemukakannya bahwa *secondary stakeholders are those people and groups in society who are affected, directly or indirectly, by the company's primary activities and decisions. They include the general public, various levels of government, social activist groups, and others* (1999:10). Sejalan dengan pandangan tersebut, di luar organisasi menurut Siagian (1995:2) terdapat berbagai kelompok yang berkepentingan yang juga harus dipuaskan oleh manajemen puncak. Mereka adalah para pemasok, para distributor dan agen, dan pemerintah.

Sebagai bagian dari struktur politik, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk di dalamnya terkait dengan eksistensi parpol yang sangat dituntut kinerja dan kiprah nyatanya, di Indonesia dikenal

adanya delapan faktor/aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap jalannya organisasi negara, yaitu *astagatra*. Kedelapan faktor ini terdiri dari tiga faktor (*trigatra*) yang bersifat fisik alamiah dan lima faktor (*pancagatra*) yang bersifat sosial. Ketiga faktor tersebut adalah posisi dan letak geografis, kondisi dan kekayaan alam, dan demografis/kependudukan. Adapun yang termasuk faktor sosial adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dalam mengambil keputusan strategis dan tindakan strategis merespon setiap perkembangan lingkungan, terlebih-lebih yang bersifat sosial, tentu parpol ditantang untuk secara jeli, tepat, integratif dan komprehensif melakukannya.

C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif-eksploratif dan berdasarkan sifat analisis datanya termasuk metode/pendekatan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi dan kepustakaan. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) menurut McMillan dan Schumacher *is concerned with the status of something. This type of research describes existing achievement, attitudes, behavior, or order characteristics of a group of subjects* (1989: 281). Penelitian ini hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum, (Hadi, 1989: 3).

Salah satu jenis penelitian deskriptif adalah penelitian perpustakaan dan dokumenter (Nazir, 1988:65). Menurut Singarimbun dan Effendi terkait dengan analisa data sekunder sebagai satu jenis penelitian, bahwa mungkin sekali untuk kepentingan pekerjaan-pekerjaan ilmiah tertentu, sudah tersedia data yang dapat digunakan. Data tersebut mungkin hasil survai yang belum diperas dan analisa lanjutan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat berguna (1989:3).

Sesuai dengan kepentingan penelitian ini, data yang bersifat sekunder berupa berbagai dokumen baik peraturan perundang-undangan, berbagai sumber literatur terkait tema penelitian, dokumen lain yang bersifat tercetak, termasuk surat kabar dan majalah dan sumber tercetak lainnya, yang secara substantif relevan, digunakan teknik studi dokumentasi. Menurut Nasution, data dari sumber non manusia seperti dokumen, foto, dan bahan statistik dapat dipandang sebagai "narasumber" yang dapat

diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti (1996:89). Teknik yang digunakan untuk menganalisis data sekunder adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis ini digunakan untuk memperoleh keterangan dari semua bentuk isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang, termasuk surat, peraturan dan undang-undang (Rakhmat, 1997:1). Menurut B. Berelson, sebagaimana dikutip oleh Krippendorff, analisis isi merupakan teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif isi komunikasi yang tampak (*manifest*) (1993:16). Selaras dengan salah satu fungsi esensial ilmu pengetahuan, digunakan pula analisis prediktif dalam upaya menggambarkan perkembangan masa depan penerapan manajemen strategik dalam kehidupan parpol.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Fungsionalisasi Parpol

Terkait dengan organisasi parpol yang pada dasarnya memiliki kesamaan dengan organisasi bisnis, yaitu sama-sama mengelola "bisnis kepercayaan", maka dengan mengadaptasi pandangan Post dkk. dan Siagian di atas, secara internal terdapat pihak-pihak yang harus mendapatkan perhatian serius dari para petinggi parpol. Mereka adalah anggota/kader parpol terutama yang telah secara intensif mengikuti berbagai aktivitas kaderisasi berjenjang; segenap jajaran struktural parpol pada semua lini organisasi dari tingkat pimpinan pusat/nasional sampai dengan ke tingkat paling bawah (desa/kelurahan); berbagai organisasi sayap/organisasi kemasyarakatan pada berbagai segmen kehidupan masyarakat yang tidak kalah penting kontribusinya bagi upaya membesarkan parpol;serta individu tertentu dan kelompok-kelompok lain di masyarakat yang secara emosional, historis dan kultural memiliki keterikatan dengan sosok parpol.

Secara eksternal, pihak-pihak tersebut meliputi antara lain warga masyarakat/publik secara umum yang memegang kedaulatan dalam negara demokrasi;parpol lain sebagai kompetitor peserta pemilu; berbagai organisasi kemasyarakatan, profesi dan kepentingan sebagai *pressure group* dan *interest group*; media massa dalam berbagai bentuknya; kalangan *civil society*; lembaga negara/pemerintah yang menetapkan regulasi kepemiluan dan kepilkadaan termasuk perangkat pemerintah di setiap daerah; pemangku keamanan dan

pertahanan negara (TNI/Polri) sampai ke tingkat daerah; penyelenggara pemilu/pilkada (KPU dan Bawaslu) beserta jajaran di tingkat daerah;serta kelompok-kelompok strategislain di masyarakat.

Berkenaan dengan tantangan utama organisasi di masa depan, dengan menganalogikan organisasi bisnis sebagai organisasi parpol, dikemukakan Post dkk. bahwa *today's business firm do not operate in social or political vacuum; rather, they find themselves in a virtual whirlwind of social and political problems and controversies. Business managers are buffeted by complicated and threatening forces, any of them glabal in scope* (1999:13). Mereka menyebut adanya enam kekuatan yang memengaruhi perkembangan bisnis, yaitu *strategic and social challenges, ethical expectations and public values, global economic change, the changing role of government and public policy, ecological and natural resource concerns, and technology and new knowledge* (1999:13). Dalam rumusan yang tidak jauh berbeda, Siagian mengidentifikasinya sebagai sesuatu yang harus dihadapi oleh manajemen puncak untuk terwujudnya efektivitas organisasi. Beberapa tantangan tersebut antara lain globalisasi ekonomi, perubahan geopolitik, pengangguran, tanggungjawab sosial, peningkatan taraf hidup, penyelenggaraan bisnis berdasarkan norma-norma moral dan etika, faktor demografi, perkembangan teknologi dan berbagai "kejutan" lainnya (1995:4).

Dalam kaitan dengan lingkungan organisasi negara, yang pada dasarnya berkarakter tidak jauh berbeda dengan organisasi parpol, Cooper dkk. (1998:203) menyebutkan bahwa *the environment in which government agencies operate and theme thods of administering them are undergoing fundamental change. Organizational structures, forms, procedures, and concepts need to change as well. They include technological change, the accelarating rate of overall change in the environment, the complexity of our social problems, increasing use the third-party management, and changing demographics.*

Dengan menganalogikan organisasi bisnis/perusahaan dan negara sebagai organisasi parpol sebagaimana dikemukakan Post dkk., Siagian dan Cooper dkk. tersebut, maka jelas kiranya tantangan lingkungan eksternal tersebut yang dihadapi parpol sangat kompleks. Hal ini sejalan pula dengan yang dikemukakan Nanus bahwa dalam konteks perubahan global, bahwa terdapat berbagai kekuatan yang berpengaruh dalam lingkungan

eksternal dan membentuk organisasi-organisasi modern antara lain perubahan teknologi yang eksplosif, dominasi perekonomian *post industry* yang didasarkan pada informasi, pengetahuan, pendidikan dan jasa; restrukturisasi perekonomian nasional untuk mengakomodasi persaingan internasional; erosi kepercayaan diri pada semua lembaga termasuk pemerintah, keluarga dan agama; tekanan ekonomi yang tinggi; peralihan demografis dan sosial budaya yang mengakibatkan diversitas dan fragmentasi nilai, gaya hidup dan selera; serta kekayaan relatif dalam materi yang digabungkan dengan kelangkaan baru dan meningkatnya resiko personal terhadap kriminal dan polusi lingkungan (2001:223).

Lebih lanjut Nanus menyebut bahwa akibat pengaruh berbagai kekuatan tersebut pada organisasi-organisasi abad 21 adalah menuntut lahirnya organisasi dengan karakteristik yaitu angkatan kerja dengan pengetahuan dan keterampilan tinggi; produk atau jasa terutama terdiri dari paket pengetahuan; lingkungan cenderung bersifat global; cenderung dipengaruhi oleh teknologi atau paling tidak sangat rentan terhadap perkembangan teknologi; dicirikan oleh perubahan yang cepat dan kompleks; aktivitas-aktivitasnya didistribusikan ke segala ruang dan waktu; cenderung bersifat multitujuan, melayani kebutuhan banyak pihak; serta cenderung mempunyai batas-batas yang tidak jelas (2001:222-226).

Dalam bahasa yang tidak jauh berbeda, Narayanan dan Nath menyebut adanya delapan hal yang berkenaan dengan tantangan masa depan yang berimplikasi kepada organisasi yaitu *globalization, discontinuity, emergence of networks, computer and communication technology, information explosion, power sharing, enlightened work force, diversity in the work force, and coexistence of bureaucracy and innovation* (1993: 591). Terkait dengan birokrasi sebagai fenomena masyarakat modern, yang tentu saja akan bersinggungan dengan parpol sebagai organisasi, pembahasannya tidak akan terlepas dari konseptualisasi yang dikemukakan oleh Max Weber sebagai tipe ideal organisasi yang dipandang cocok sesuai dengan masyarakat industri pada akhir abad ke 19 di Eropa.

Dalam kaitan ini, Blau dan Meyer menyebutkan bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan cara administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang

secara sistematis. Tidak dibatasi pada cabang-cabang pemerintahan militer dan sipil, tetapi ditemukan dalam organisasi bisnis, serikat kerja, gereja, universitas dan bahkan dalam klub-klub baseball (2000:4). Oleh karena itu, tentu saja birokrasi ini ada pula pada organisasi parpol yang secara faktual telah menorehkan sejarah panjang dalam geliat kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dikatakan demikian karena bila dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas manusia, dengan mengikuti pandangan Narayanan dan Nath (1993: 4), organisasi merupakan an *arena where human beings come together to perform complex task so as fulfill common goal (s)*. Berkenaan dengan permasalahannya, Narayanan dan Nath menyatakan lebih lanjut bahwa *the greatest fault of bureaucracy is that it kills innovation and creativity. It also prevents organizations from adapting to changing environments. As we mentioned above, the environment in this decade as well as in the next century is going to become very volatile, discontinuous, and unpredictable* (1993: 597).

Karena tidak berada dalam ruang hampa udara, tentu saja parpol sebagai organisasi akan dihadapkan pada aneka tuntutan dan perkembangan lingkungan yang bergerak sangat cepat. Apalagi bila mengamati peran strategis dan fungsinya dalam kehidupan bangsa dan negara, maka lembaga yang termasuk salah satu pilar demokrasi ini, termasuk apa yang dinyatakan oleh Talcot Parsons sebagai *political organizations*, yang aktivitasnya *concerned with ensuring that society as a whole achieves its objectives* (dalam Narayanan dan Nath, 1993:4). Sikap proaktif, antisipatif, serta cara pandang dan gerak langkah yang visioner merupakan kebutuhan nyata bila dirinya ingin tetap eksis dalam kehidupan masyarakat dan negara yang dituntut makin demokratis, akuntabel, transparan dan partisipatif. Oleh karena itu, karya nyatanya bagi kepentingan publik yang luas merupakan satu-satunya respon organisasional yang tepat.

Dalam kaitan ini, penerapan manajemen strategik pada organisasi parpol merupakan suatu tuntutan dan kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda. Mengingat demokrasi dan kepentingan publik pada *era good governance* saat ini merupakan sesuatu yang tidak diperdebatkan lagi, maka gugatan sudah saatnya dilayangkan pada dirinya terkait dengan bagaimana fungsionalisasi peran instrumentalnya secara nyata dalam mengusung demokratisasi. Dalam kaitan ini telah diingatkan oleh Klingemann dkk. (2000:8)

bahwa parpol merupakan aktor-aktor utama di dalam sistem yang menghubungkan antara kewarganegaraan dengan proses pemerintahan. Atau, sebagaimana dinyatakan Meehan dkk. bahwa dalam masyarakat demokratis, *political parties appear as the arteries of the body politic* (1966:7). Rakyat mendambakan tampilnya sosok parpol yang benar-benar responsif dan aspiratif terhadap apa yang selama ini menjadi keluhan kesahnya. Negara juga memerlukan hadirnya parpol yang kapabel dalam menjalankan fungsi-fungsinya sehingga dapat turut mengakselerasi lahirnya sistem politik yang makin demokratis.

Oleh karenanya, tantangan dan permasalahan penerapan manajemen strategik pada parpol ini antara lain dapat diidentifikasi dan dianalisis dari fungsionalisasi peran utamanya sebagai salah satu pilar negara demokrasi. Kontribusi parpol bagi terbangunnya lembaga-lembaga kenegaraan, baik langsung maupun tidak langsung, serta penguatan perangkat kelembagaan politik yang ada dalam sistem administrasi negara secara keseluruhan pada era konsolidasi demokrasi di Indonesia saat ini, antara lain dapat diidentifikasi dari aktualisasi fungsi-fungsinya. Dengan demikian, analisis lingkungan internal berupa sumber-sumberdaya organisasi serta analisis eksternal organisasi parpol mutlak dilakukan sehingga dapat dengan tepat menetapkan strategi yang diperlukan dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif.

Dengan merujuk kepada pandangan Budiardjo (2008:405), maka fungsi-fungsi tersebut meliputi sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik (*conflict management*). Sangat dimafhumi bahwa dari sisi komunikasi politik, praktik administrasi negara dan pemerintahan selama ini seringkali muncul permasalahan-permasalahan yang secara substantif bilamana ditelusuri akar permasalahannya terletak pada lemahnya komunikasi antara tatanan suprastruktur dan infrastruktur politik. Publik kerap kali mendapat suguhan informasi yang tidak proporsional bahkan menyesatkan dari berbagai pihak tentang suatu isu publik. Padahal hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila segenap aktor politik yang berada pada seluruh jajaran dan hirarki parpol tampil cerdas menjelaskan kepada publik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pada sisi ini terdapat tuntutan sekaligus tantangan kepada segenap kader/anggota parpol, terlebih-lebih mereka yang telah

menjadi pejabat publik untuk terus menerus meningkatkan kemampuan diri terkait materi isu-isu publik yang tengah menjadi sorotan luas. Strategi peningkatan kualitas kader parpol baik yang dilakukan secara internal maupun yang berkolaborasi dengan institusi lain, saat ini merupakan satu hal yang patut menjadi perhatian serius para petinggi parpol.

Seyogianya sebagai legislator yang telah terpilih dalam pemilu, sebagai bagian dari *elected officials* (Howlett & Ramesh, 1995:21) dirinya merupakan aktor kunci yang sangat berperan penting bagi terlegitimasinya sebuah kebijakan publik melalui forum perjuangan politik di parlemen. Pada sisi lain, sangat besar pula kontribusinya dalam kiprah-kiprah keseharian dalam mengartikulasikan berbagai isu di masyarakat. Terkait dengan ini, sangat banyak persoalan yang muncul diantara dua pemilu yang memerlukan tampilnya para legislator sebagai komunikator yang andal. Berbagai isu terkait pemikiran dan aksi terorisme dan radikalisme serta makin banyaknya warga negeri yang kepincut kepada ISIS/NIIS saat ini, misalnya, yang berpotensi mengoyak-ngoyak keutuhan bangsa dan negara semestinya menjadi perhatian serius para legislator, sekurang-kurangnya untuk dikomunikasikan dengan konstituennya masing-masing. Hal ini terkait pula dengan salah satu kewajiban parpol sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf k UU Nomor 2 Tahun 2008 yaitu untuk menyosialisasikan program partai kepada masyarakat yang tentu didalamnya terkandung visi dan misi parpol.

Dari aspek sosialisasi politik, disadari bahwa lahirnya warganegara yang memiliki rasa pengabdian, tanggungjawab, kecintaan, komitmen yang tinggi serta persatuan dan kesatuan bangsa, bukan hanya semata-mata tanggungjawab pemerintah, khususnya institusi-institusi pendidikan. Berbagai permasalahan bangsa yang diantaranya terfokus pada lembaga-lembaga suprastruktur politik, khususnya legislatif dan eksekutif, misalnya dalam bentuk perilaku koruptif, hedonis dan defisit integritas sangat boleh jadi merupakan akumulasi dari tidak maksimalnya peran sosialisasi politik. Seluruh *slagorde* parpol mempunyai peran dan tanggungjawab sangat besar, sekurang-kurangnya terhadap para anggota/kadernya, untuk dapat tampil sebagai warganegara yang berorientasi kepada kepentingan publik. Dalam kaitan ini, internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai (*filosofis, etis, sosial*) dipandang sangat

penting bagi terbentuknya tatanan kehidupan demokratis, sehingga dengan demikian merupakan sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Diyakini bahwa tatanan demokratis akan terbangun bukan hanya oleh penataan desain kelembagaan/struktur politik, tetapi juga oleh fakta sosiologis berupa telah *builting*-nya nilai-nilai demokrasi pada sikap dan perilaku individu. Peran sosialisasi ini misalnya saat ini sangat ditunggu secara nyata dari para aktivis parpol dalam menumbuhkan wawasan, sikap dan perilaku antikorupsi serta sikap dan tindakan yang menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba sebagai musuh besar bangsa. Dalam konteks inilah, peran para legislator dipertaruhkan melalui peran strukturalnya di parlemen dan peran personal sosiologisnya dalam persenyawaan dengan geliat hidup masyarakat. Dengan sendirinya parpol dituntut melahirkan berbagai strategi yang tepat secara sosiologis karena berkaitan dengan peran interaksinya dalam masyarakat. Terkait dengan ini, dalam Pasal 13 huruf e UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa kewajiban parpol adalah melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.

Dari aspek rekrutmen politik, harus disadari sepenuhnya oleh segenap petinggi parpol bahwa salah satu persoalan krusial bangsa saat ini adalah krisis kepemimpinan. Momen pemilu (pileg dan pilpres) dan pilkada merupakan kesempatan emas yang harus dimanfaatkan parpol untuk melakukan *environmental scanning*. Heboh tentang isu deparpolisasi yang mengiringi tampilnya banyak bakal calon melalui jalur perseorangan dalam perhelatan pilkada, baik yang berasal dari kader parpol maupun luar parpol, terutama pada jelang pilkada Gubernur DKI Jakarta, benar-benar harus menjadi momentum yang tepat untuk berintrospeksi. Analisis internal dan eksternal organisasi mutlak dilakukan secara benar, penuh kesungguhan dan profesional. Strategi yang tepat dalam melahirkan kader pemimpin bangsa yang kapabel sekaligus berintegritas sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tidak kalah penting lagi tentu langkah progresif untuk melakukan pengawasan/pengendalian sekaligus evaluasi terhadap strategi yang telah dijalankan. Hal ini merupakan modal besar organisasi untuk penyempurnaan strategi bahkan penyempurnaan visi, misi, sasaran, program dan kebijakan serupa yang akan datang.

Sekarang ini, sangat boleh jadi telah tampil banyak pemimpin politik dan pemerintahan pada

berbagai jenjang yang kapabel tetapi sangat sedikit dari mereka yang berintegritas. Oleh karenanya, dalam konteks ini peran berbagai kebijakan dan program kaderisasi di internal parpol menjadi sangat penting dan strategis. Tampilnya kader yang memahami secara komprehensif tentang visi, misi, platform dan garis perjuangan parpol merupakan satu tantangan tersendiri bagi para petinggi parpol saat ini. Sekarang ini bukanlah hal yang terlampaui sulit untuk melahirkan politisi handal pada era multipartai. Justru kesulitan sangat terasa ketika saat ini Bangsa Indonesia sangat merasakan kurangnya pemimpin politik dan pemerintahan yang berkualifikasi negarawan. Disinilah secara nyata terdapat tantangan dan tuntutan kepada dirinya untuk membuat dan menetapkan program strategis kaderisasi yang benar-benar tepat di tengah kehidupan parpol yang sangat kompetitif.

Seorang aktivis politik termasuk mereka yang telah menjadi legislator dapat disebut negarawan manakala seluruh fikiran, sikap dan perilaku yang bersangkutan secara utuh diabdikan untuk kepentingan publik, tidak lagi semata-mata berorientasi kepada kepentingan partai politik tempatnya bernaung. Sejarah politik kontemporer Indonesia telah menunjukkan bahwa parpol telah tampil sebagai salah satu kawah candradimuka yang strategis bagi lahirnya pemimpin bangsa yang berkualitas. Pada tatanan masyarakat yang masih kental dengan corak paternalistik saat ini, sangat boleh jadi berbagai bentuk sikap dan perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang timbul di masyarakat lebih merupakan refleksi dari apa yang selama ini dipertontonkan para legislator dalam panggung politik. Disinilah terdapat tuntutan dan tantangan kepada para legislator untuk benar-benar tampil sebagai teladan bagi masyarakatnya. Tidak terlalu salah bila ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari.

Dari aspek pengaturan konflik, fungsi parpol berkaitan dengan potensi-potensi konflik dalam masyarakat yang secara natural akan selalu ada. Terlebih-lebih dalam masyarakat Indonesia yang secara sosiokultural sangat heterogen, maka faktanya memang acapkali muncul konflik-konflik sosial berlatarbelakang sentimen-sentimen agama, kelompok, etnis atau golongan. Sikap dan perilaku intoleran terhadap perbedaan terutama yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan masih pula mewarnai kehidupan sosial masyarakat kita. Saat ini tidak jarang hal tersebut bahkan selalu berujung dengan tindak kekerasan dan kerusuhan massa, termasuk ketika berhadapan-hadapan dengan

aparatus keamanan. Bila dibiarkan, bukan mustahil hal ini akan berkontribusi terhadap disintegrasi bangsa. Pada titik inilah parpol dituntut peran sebagai instrumen demokrasi yang sekurang-kurangnya meminimalkan dampak dari konflik tersebut. Dalam rumusan Blondel, terkait dengan fungsi ini, at the level of the society as a whole, political parties are general mechanism by which conflicts are handled (1995:133).

Tentu saja peran-peran eksternal seperti itu akan sangat tergantung kepada soliditas internal peran parpol yang bersangkutan. Mustahil dirinya akan tampil sebagai sarana pengatur konflik kalau untuk me-manage dirinya sendiri sudah kelimpungan dan memakan energi organisasi yang besar. Secara organisatoris internal, merupakan permasalahan pula apabila ditengok sejarah perpolitikan Indonesia, khususnya di era pascakejatuhan rezim Orde Baru. Konflik internal dengan aneka latar belakangnya menjadi warna tersendiri dalam perpolitikan saat ini. Padahal, pada macam organisasi apapun, sebenarnya konflik itu sesuatu yang alamiah akan terjadi.

Satu hal yang mengemuka saat ini adalah bahwa konflik seringkali dipandang sebagai sesuatu yang "aib" dan solusi terhadap konflik juga tidak mengedepankan cara-cara damai dan bermartabat. Kehidupan parpol saat ini masih menampilkan cara-cara penyelesaian konflik internal yang tidak sehat dan tidak dewasa. Sejarah perparpolan di masa reformasi saat ini masih mencatat betapa konflik internal beberapa parpol, misalnya Golkar dan PPP, bukan saja telah sangat melelahkan karena mengurus energi para fungsionaris bahkan juga pemerintah, tetapi juga menorehkan pesimisme peran strategis dirinya dalam turut membangun sistem politik demokratis. Konflik internal berkepanjangan secara faktual telah merugikan peta "karir politik" para kader parpol di banyak daerah karena mereka kesulitan dalam proses pencalonan pilkada ke KPU setempat sehingga banyak diantaranya yang maju melalui jalur perseorangan. Di sinilah dituntut kepiawaian para ahli strategi parpol untuk menetapkan dan mengeksekusi strategi organisasional yang benar-benar relevan dengan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal.

Berkenaan dengan konflik internal parpol ini, TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa telah mengingatkan bahwa etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur,

amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Fenomena saat ini tampak bahwa hengkangnya elit-elit parpol dan berpindah ke parpol lain atau mendirikan partai politik baru seringkali dilatarbelakangi oleh kesadaran yang masih rendah terhadap makna konflik dalam organisasi serta penyalurannya secara dewasa dan bermartabat.

2. Pemindaian Lingkungan

Kegiatan ini menurut Hunger dan Wheelen meliputi pengamatan lingkungan eksternal untuk melihat kesempatan/ peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) serta mengamati lingkungan internal untuk melihat kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) (2003:9). Dalam rangka ini, para manajer parpol secara internal harus dengan penuh kejujuran dan ketelitian mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor strategis internal organisasi. Diantaranya adalah anggota/kader parpol terutama yang telah secara intensif mengikuti berbagai aktivitas kaderisasi berjenjang; segenap jajaran struktural parpol pada semua lini organisasi dari tingkat pimpinan pusat/ nasional sampai dengan ke tingkat paling bawah (desa/kelurahan); berbagai organisasi sayap/ organisasi kemasyarakatan *underbouw* pada berbagai segmen kehidupan masyarakat yang tidak kalah penting kontribusinya bagi upaya membesarkan parpol; serta individu tertentu dan kelompok-kelompok lain di masyarakat yang secara emosional, historis dan kultural memiliki keterikatan dengan sosok parpol. Selain itu, faktor organisasi dan sumberdaya organisasi lain seperti keuangan, informasi, sarana dan prasarana serta teknologi juga mesti mendapatkan perhatian saksama untuk diidentifikasi dan dianalisis sehingga tampak dengan jelas pemetaannya, baik yang bersifat kekuatan maupun kelemahan organisasi.

Secara eksternal, kejelian para petinggi parpol sangat dituntut pula untuk dengan tepat menemukannya berbagai perkembangan lingkungan yang sangat cepat. Dengan langkah ini, akan segera diketahui sekaligus harus dianalisis hal-hal apa atau pihak-pihak mana yang merupakan peluang/kesempatan (*opportunities*) yang harus direbut dan dimanfaatkan parpol serta hal-hal apa yang menjadi ancaman (*threats*) yang berpotensi menjadi penghalang serius bagi pencapaian target

organisasi. Secara eksternal, pihak-pihak tersebut meliputi antara lain warga masyarakat/publik secara umum sebagai *shareholder* yang memegang kedaulatan dalam negara demokrasi, terlebih-lebih mereka yang terkategori sebagai *swing voters*; parpol lain sebagai kompetitor peserta pemilu; berbagai organisasi kemasyarakatan, profesi dan kepentingan sebagai *pressure groups* dan *interest groups*; media massa yang setiap saat bakal "menguliti" apapun yang dilakukan parpol terlebih-lebih yang kontraproduktif dengan arus demokratisasi; kalangan *civil society* yang sebagai kekuatan pengimbang otoritas negara akan selalu mengoreksi langkah parpol yang dinilai keluar dari aspirasi publik; perangkat negara (pemerintah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif) yang menetapkan regulasi kepemiluan dan kepilkadaan termasuk perangkat pemerintah di setiap daerah; pemangku keamanan dan pertahanan negara (TNI/Polri) sampai ke tingkat daerah; penyelenggara pemilu/pilkada (KPU dan Bawaslu) beserta jajaran di tingkat daerah; serta kelompok strategis lain di masyarakat misalnya kalangan intelektual, budayawan, pelaku bisnis dan agamawan.

Tantangan terhadap eksistensi dan kiprah parpol ini dalam perspektif pembangunan nasional menjadi bagian penting pula untuk diperhatikan para petinggi parpol dalam merumuskan keputusan strategis dan mengesekusi tindakan strategis. Dalam kaitan ini, UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 telah menggariskan bahwa tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dalam pembangunan politik adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut, tantangan yang akan dihadapi adalah melaksanakan reformasi struktur politik, menyempurnakan proses politik, dan mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai. Tantangan lain adalah mendorong terbangunnya parpol yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan negara secara profesional.

Dalam kaitan dengan kepentingan pembangunan nasional, para manajer dan ahli strategi parpol seharusnya responsif terhadap perkembangan masyarakat yang apabila tidak

dimanfaatkan dengan tepat akan kontraproduktif dengan soliditas organisasi. Harus disadari bahwa bergemuruhnya *eforia* reformasi yang dari hari ke hari semakin terasa di tengah-tengah masyarakat tidak seharusnya menjadikan elit politik “buta” terhadap realita yang berkembang di masyarakat. Salah satu buktinya, dari 12 parpol yang “dijual” kepada rakyat pada pemilu 2014 yang mendapat dukungan nyata dan mempunyai wakil di Senayan tidak lebih dari 10 parpol. Dengan kata lain, hal ini mengindikasikan adanya kesadaran politik yang semakin baik dimiliki rakyat yang tentu secara resiprokal harus menjadi pertimbangan dalam perilaku politiknya. Dari perspektif manajemen strategik, hal ini menjadi salah satu faktor lingkungan strategis karena dapat memengaruhi kinerja organisasi. Hal ini telah diingatkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2007 bahwa kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembangnya kesadaran-kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat lebih jauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan publik.

Kapabilitas para manajer parpol saat ini dalam melakukan pemindaian atau pengamatan lingkungan (*environmental scanning*) sebagai salah satu fase dari manajemen strategik ini tampak masih belum menjadi aktivitas fungsional. Beberapa perkembangan lingkungan eksternal yang sangat pesat sebagaimana dikemukakan para ahli, khususnya yang berkenaan dengan ekspektasi etik dan nilai-nilai kepublikan, ramifikasi teknologi, kompleksitas masalah sosial, krisis kepercayaan, eksplosivitas informasi dan globalisasi, masih belum menjadi objek sentuhan para “ideolog” dan manajer parpol untuk diidentifikasi secara detail, dianalisis dengan perangkat metodologi tertentu, misalnya Analisis SWOT, yang selanjutnya ditransformasi menjadi pernyataan visi dan misi organisasi.

3. Formulasi Strategi

Perumusan atau formulasi strategi menurut Hunger dan Wheelen (2003:12) merupakan pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Hal ini meliputi penentuan misi perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan.

Secara normatif, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah

dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 dalam Pasal 2 ayat (4) telah menegaskan bahwa anggaran dasar parpol salah satunya harus memuat visi dan misi parpol. Dengan demikian, sangat penting, strategik dan deterministik keberadaan visi dan misi parpol ini sebagai organisasi. Pernyataan visi (*vision*) dibuat oleh perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan “*what will our business be?*” atau pernyataan “*what do we want to become?*”. Pernyataan visi menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai berbagai hasil di masa mendatang sehingga akan menuntun pengerahan sumber daya perusahaan bagi pencapaian berbagai tujuan tersebut. Visi yang dibuat oleh perusahaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan misi perusahaan, dalam arti arah strategis yang dinyatakan di dalam visi masih berada dalam lingkup usaha yang dijalankan oleh perusahaan.

Pernyataan misi terutama ditujukan untuk menjawab pernyataan “*what is our business?*” yang akan menentukan ruang lingkup bisnis (*business scope*) yang akan dijalankan oleh perusahaan dilihat dari produk apa yang dihasilkan oleh perusahaan, siapa yang menjadi konsumen produk perusahaan, nilai/*value* apa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Suatu misi strategis menurut Hitt dkk (2001: 27) memberikan keterangan umum tentang produk-produk yang ingin diproduksi suatu perusahaan dan pasar yang akan dilayaninya dengan menggunakan kompetensi inti internalnya. Misi strategis mengalir dari tujuan strategis, misi strategis adalah aplikasi dari tujuan strategis (2001: 23-27). Tujuan strategis dan misi strategis dibentuk berdasarkan informasi dan wawasan yang diperoleh dari studi lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Tujuan strategis menunjukkan bagaimana sumberdaya, kapabilitas, dan kompetensi inti akan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam lingkungan kompetitif.

Misi menurut Siagian mutlak perlu dirumuskan oleh suatu organisasi atau perusahaan karena misi itulah yang berperan sebagai “pemandu” tindakan eksekutif di masa depan. Misi inilah yang membuat organisasi memiliki jati diri yang khas dan sekaligus membedakannya dari organisasi lain yang bergerak dalam bidang usaha sejenis (1995: 43). Dalam ungkapan yang tidak jauh berbeda, Peter Drucker, dalam bukunya *Management: Tasks, Responsibilities, and Practices* sebagaimana dikutip David (2004:80) mengemukakan bahwa suatu misi bisnis merupakan dasar untuk menetapkan prioritas, strategi, rencana dan penugasan kerja. Itu

merupakan titik awal untuk mendesain pekerjaan manajerial, dan lebih penting dari yang lain, untuk mendesain struktur manajerial.

Menurut Philip Kotler, O.C. Ferrell dan Charles Lamb dalam bukunya *Strategic Marketing for Nonprofit Organization*, misi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita di masa depan (Salusu, 1996: 121). Suatu pernyataan misi, menurut Vern McGinnis dalam sebuah tulisannya berjudul *The Mission Statement: A Key Step in Strategic Planning* (David, 2004:82) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Menetapkan apa sebenarnya organisasi dan organisasi ingin menjadi seperti apa; b. Cukup dibatasi untuk tidak menyertakan beberapa usaha dan cukup luas yang memberi ruang pada pertumbuhan kreatif; c. Membedakan suatu organisasi dari semua yang lain; d. Dipakai sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi aktivitas saat ini dan masa depan, dan e. Dinyatakan dalam istilah cukup jelas untuk dipahami secara meluas di seluruh organisasi.

Dengan rumusan yang tidak begitu berbeda, W.R. King dan D.I. Cleland, dalam bukunya *Strategic Planning and Policy* (David, 2004:82) mengemukakan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa organisasi agar mengembangkan dengan hati-hati pernyataan misi tertulis, sebagai berikut :a. Untuk memastikan kebulatan tujuan dalam organisasi; b. Untuk menyediakan dasar atau standar untuk mengalokasikan sumberdaya organisasi, c. Untuk menetapkan nuansa umum atau iklim organisasi; d. Untuk difungsikan sebagai titik pusat bagi individu-individu agar menyelaraskan diri dengan tujuan dan arah organisasi, dan mencegah mereka yang tidak dapat berpartisipasi lebih lanjut dalam aktivitas organisasi; dan e. Untuk merinci tujuan organisasi dan menerjemahkan tujuan ini menjadi sasaran sedemikian rupa sehingga parameter biaya, waktu, dan prestasi dapat dinilai dan dikendalikan.

Selain harus berpedoman kepada fungsi-fungsi parpol sebagaimana disebut dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008, setiap parpol dalam tahap perumusan strategi ini harus pula menetapkan tujuan organisasi, strategi serta pedoman kebijakan. Dalam kaitan ini, undang-undang telah menetapkan bahwa tujuan umum parpol sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (1) yaitu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pembukaan UUD 1945; menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan khusus parpol sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 ayat (2) adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; memperjuangkan cita-cita parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Terkait dengan visi dan misi organisasi parpol ini, dalam Pasal 5 Ketetapan Muktamar VIII PPP No: 8/TAP/MUKTAMAR VIII/PPP/2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP, disebutkan bahwa tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir-batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wata'ala. Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, PPP melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Mewujudkan serta membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada *Allah Subhanahu Wata'ala*, meningkatkan mutu kehidupan beragama, serta mengembangkan ukhuwah Islamiyah. Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya paham-paham *atheisme*, *komunisme*/*marxisme*/*leninisme*, *sekularisme*, dan pendangkalan agama;
- b. Menegakkan hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah insaniyah. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neofeodalisme, liberalisme, paham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan;
- c. Memelihara rasa aman, mempertahankan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan, dan konflik

► *Tatang Sudrajat*

- sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika;
- d. Melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang menzalimi rakyat;
 - e. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridai oleh *Allah Subhanahu Wata'ala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan pendidikan, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan;

Sementara itu, Partai Golkar, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 7 Anggaran Dasarnya bertujuan a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945; b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati Kebenaran, Keadilan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8 nya menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, tugas pokok Partai Golkar adalah memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional. Berkaitan dengan fungsinya, Pasal 9 menegaskan bahwa Partai Golkar berfungsi:

- a. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
- b. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan,

- c. Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara substantif, terma “tujuan” dan “usaha” pada anggaran dasar PPP dan terma “tujuan”, “tugas pokok” dan “fungsi” pada anggaran dasar Partai Golkar jelas menunjukkan visi dan misi sebagaimana dimaksudkan dalam manajemen strategis. Namun demikian, berdasarkan amatan selama ini terhadap sosok dan kiprah organisasi parpol pada umumnya dalam berinteraksi dengan lingkungannya, tampak bahwa formulasi strategi masih merupakan fase dalam manajemen strategik yang masih jarang mendapat sentuhan para aktivis parpol. Berbagai forum internal organisasi di berbagai tingkatan (kongres, muktamar, munas dan sebagainya) masih jauh dari sebutan sebagai perhelatan yang dipenuhi perdebatan bernas ke arah mana organisasi akan menuju, serta dengan strategi apa setiap tujuan dan sasaran organisasi akan diwujudkan. Pergumulan pemikiran dan sumber daya organisasi kurang sekali terfokus kepada pendalaman terhadap aspek-aspek sasaran-sasaran operasional, strategi kekinian sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang masif, kebijakan mendasar organisasi di tengah ketidakpastian lingkungan, serta aspek-aspek mendasar lain bagi tampilnya organisasi dalam era yang serba kompetitif.

Tampak bahwa arena politik yang oleh anggaran dasar/anggaran rumah tangga parpol telah ditasbihkan sebagai ajang demokratis ini justru sering kali lebih banyak diwarnai oleh pergulatan kekuatan para pihak yang berkompetisi untuk meraih jabatan-jabatan inti dalam organisasi dengan mempertontonkan berbagai sikap dan perilaku yang seringkali nondemokratis. Berkenaan dengan hal ini, lampiran UU Nomor 17 Tahun 2007 Bab II angka II.1 telah mengindikasikan bahwa perkembangan visi dan misi parpol ternyata belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan kesadaran dan dinamika kehidupan sosial politik masyarakat dan tuntutan demokratisasi. Dengan kata lain terdapat tuntutan kepada setiap parpol agar segera melakukan revisi terhadap pernyataan visi dan misi organisasinya sehingga benar-benar relevan dengan perkembangan lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

4. Implementasi Strategi

Menurut Hunger dan Wheelen, implementasi strategi adalah proses

dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Proses tersebut mungkin merupakan perubahan budayasecara menyeluruh, struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan (2003:17). Implementasi menurut Salusu adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan, merupakan operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu (1996: 409). James M Higgins sebagaimana dikutip Salusu mengemukakan bahwa implementasi adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dari strategi (1996: 409). Dalam pandangan David, masalah manajemen di seputar implementasi strategi termasuk menetapkan sasaran tahunan, melengkapi kebijakan, mengalokasikan sumber daya, mengubah struktur organisasi yang sudah ada, merestrukturisasi dan rekayasa ulang, merevisi rancangan penghargaan dan intensif, meminimalkan penolakan terhadap perubahan, mencocokkan manajer dengan strategi, mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menyesuaikan proses produksi/operasi, mengembangkan fungsi sumber daya manusia yang efektif dan, bila perlu, menyusutkan ukuran (2004: 222).

Sasaran tahunan menurut David penting bagi implementasi strategi, karena sasaran menggambarkan dasar untuk mengalokasikan sumber daya; merupakan mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer; merupakan instrumen utama untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian sasaran jangka panjang; serta menetapkan prioritas organisasi, divisi, dan departemen (2004: 222). Terkait dengan pentingnya keberadaan kebijakan (*policy*), dikemukakan lebih lanjut bahwa perubahan dalam arah strategis perusahaan tidak terjadi secara otomatis. Kebijakan mempermudah penyelesaian masalah yang terjadi berulang kali dan menjadi pedoman implementasi strategi. Didefinisikan secara luas, kebijakan merujuk pada pedoman, metode, prosedur, aturan, formulir, dan praktek administratif spesifik yang ditetapkan untuk mendukung dan mendorong pekerjaan ke arah sasaran yang dinyatakan (2004: 225).

Implementasi strategi ini berkaitan juga dengan pengalokasian sumber-sumber daya dengan organisasi. Dalam kaitan ini, David menyebutkan bahwa alokasi sumber daya adalah aktivitas manajemen sentral yang

memungkinkan pelaksanaan strategi. Manajemen strategik memungkinkan sumber daya dialokasikan menurut prioritas yang ditetapkan oleh sasaran tahunan (2004: 227). Dikemukakan lebih lanjut bahwa tidak ada yang lebih merugikan manajemen strategis dan sukses organisasi ketimbang sumber daya yang dialokasikan dengan cara yang tidak konsisten dengan prioritas yang ditunjukkan oleh sasaran tahunan yang sudah disetujui. Semua organisasi paling sedikit mempunyai empat tipe sumber daya yang dapat dipakai untuk mencapai sasaran yang diinginkan, yaitu sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi (2004:227).

Implementasi strategi berkaitan juga dengan konflik. Dalam pandangan David, konflik merupakan ketidaksetujuan antara dua pihak atau lebih mengenai satu atau beberapa masalah. Konflik tidak mungkin dihindari dalam organisasi, jadi harus ditangani dan diselesaikan sebelum konsekuensi yang merusak fungsi mempengaruhi prestasi kerja organisasi (2004:228). Dikemukakan lebih lanjut bahwa konflik tidak selalu jelek. Tidak adanya konflik dapat menjadi sinyal sikap acuh tak acuh dan apatis. Konflik dapat berfungsi membangkitkan semangat pihak-pihak yang bertentangan dan dapat membantu manajer mengenali masalah. Terdapat tiga kategori pendekatan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik yaitu menghindari, defusi dan konfrontasi (2004:228).

Perubahan dalam strategi menurut David sering mengharuskan adanya perubahan dalam struktur organisasi karena dua alasan. Pertama, struktur terutama menentukan bagaimana sasaran dan kebijakan ditetapkan. Kedua, struktur menentukan cara sumberdaya akan dialokasikan. Struktur harus dirancang untuk mempermudah perusahaan melaksanakan strategi, dan karena itu menyesuaikan dengan strategi. Berbagai kekuatan eksternal dan internal mempengaruhi organisasi, tidak ada perusahaan yang dapat mengubah strukturnya sebagai tanggapan atas setiap kekuatan ini, karena melakukannya berarti kekacauan besar (2004: 228-229). Dikemukakan lebih lanjut bahwa kalau sebuah perusahaan mengubah strateginya, maka struktur organisasi yang sudah ada dapat menjadi tidak efektif. Perubahan dalam struktur dapat mempermudah usaha implementasi strategi, tetapi perubahan dalam struktur jangan diharapkan akan mengubah strategi buruk menjadi baik, membuat manajer buruk menjadi baik atau membuat produk jelek terjual (2004: 330).

Dengan mengacu kepada hal-hal mendasar yang merupakan bagian integral dalam tahap implementasi strategi, tampak bahwa parpol sebagai organisasi masih jauh dari harapan telah menjalankan fase ini dengan optimal. Tantangan dan permasalahan yang muncul pada tahap ini lebih pada defisitnya kualitas dan integritas para fungsionaris parpol, bukan pada kapabilitas intelektual dan manajerialnya. Hal ini berkenaan dengan masih relatif rendahnya internalisasi dan aktualisasi nilai demokrasi dalam gerak keorganisasian. Sebagai contoh adalah betapa tidak gampangya parpol menerapkan prinsip keterbukaan dan demokrasi dalam pemilu, yang seringkali berujung konflik jelang pendaftaran bakal calon kepada penyelenggara pemilu. Padahal hal ini dengan sangat eksplisit disebutkan dalam Pasal 29 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pasal 10 Ayat (92) Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pentingnya kebijakan parpol untuk mewujudkan visi, misi dan program digariskan pula dalam Pasal 30 UU Nomor 2 Tahun 2008 dalam bentuk kewenangannya membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau keputusan parpol berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Komitmen dan kesungguhan untuk menyelesaikan konflik secara tulus, tuntas dan terbuka juga belum menjadi warna organisasi yang dominan. Secara eksplisit Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2008 telah mengatur penyelesaian perselisihan parpol ini, meliputi perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota parpol, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap keputusan parpol. Seringkali bertele-telenya konflik pada beberapa parpol mengindikasikan masih relatif rendahnya pemahaman para aktivis terhadap nilai-nilai organisasi dan demokrasi.

Bergulirnya wacana peningkatan bantuan pemerintah melalui anggaran negara/daerah beberapa waktu lalu yang kemudian menuai kontroversi publik menunjukkan bahwa aspek keuangan dalam pengelolaan organisasi sangat sensitif. Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 antara lain menyebutkan bahwa keuangan parpol bersumber dari iuran anggota dan bantuan

keuangan dari APBN/APBD. Sensitivitas dan kontroversi publik ini bukan hanya berkaitan dengan akan makin bertambahnya beban keuangan negara yang notabene uang milik rakyat, tetapi juga menyangkut isu kemandirian, transparansi dan akuntabilitas. Kemandirian parpol semestinya harus dimaknai juga sebagai makin bertambahnya iuran anggota sebagai wujud parpol kader dan modern. Transparansi dan akuntabilitas sangat berkenaan dengan keharusan organisatoris untuk pengelolaan keuangan secara bertanggungjawab dan publik berhak tahu tentang hal tersebut. Pasal 38 UU Nomor 2 Tahun 2008 dan Pasal 39 UU Nomor 2 Tahun 2011 secara eksplisit mengatur hal tersebut, dan belum semua parpol secara konsisten melaksanakannya.

Peningkatan kesetaraan gender merupakan bagian penting dalam implementasi strategi karena berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya manusia sekaligus tuntutan demokrasi. UU Parpol secara gamblang mengatur hal dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e yang mensyaratkan rekrutmen politik dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, serta Pasal 20 yang mengatur kepengurusan parpol dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Terkait dengan rekrutmen jabatan publik, Pasal 55 dan Pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 telah mengatur pengajuan bakal calon anggota DPR dan DPRD dengan keterwakilan perempuan minimal 30%. Faktanya dalam proses pencalonan, sebagian parpol harus memperbaiki berkas pencalonan karena setelah diverifikasi penyelenggara pemilu tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Bila dirunut pada sumber konflik pada beberapa parpol sebagian diantaranya berkaitan dengan mekanisme pengambilan keputusan, yang dilihat dari aspek manajemen strategis hal inipun sangat penting. UU Parpol telah menggariskan pentingnya pengambilan keputusan pada semua tingkatan secara demokratis, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Sebagai perwujudan dari ketentuan tersebut, PPP telah mengaturnya dalam Pasal 79 anggaran dasar, sedangkan Partai Golkar dalam Pasal 36 anggaran dasarnya. Dalam kaitan ini, internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai dan prinsip demokrasi pada sebagian parpol, termasuk PPP dan Partai Golkar masih jauh dari menggembirakan, karena masih sangat kental dengan aroma egoisme individual dan kepentingan kelompoknya.

Demikian pula dalam peran interaksinya dengan masyarakat, masih jauh dari harapan untuk

penampilan dirinya sebagai pilar demokrasi. Hal ini terkait dengan keran keterbukaan dan kebebasan saat ini telah membawa dampak yang tidak selamanya konstruktif bagi tumbuh kembangnya sikap dan perilaku demokratis. Berbagai bentuk sikap dan perilaku sebagian warga negara yang destruktif, eksklusif, intoleran, sektarian serta menghalalkan segala macam cara, bukan saja bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga sangat berpotensi merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Di sinilah terdapat tantangan dan tuntutan terhadap peran nyata dirinya bagi kepentingan yang lebih luas.

Berbagai kekecewaan publik pada dirinya yang mengemuka melalui berbagai media dan melahirkan krisis kepercayaan yang serius tentu merupakan sinyal sosiologis yang harus direspon dengan penuh kesungguhan. Hanya dengan inilah parpol tidak lagi hanya berperan sebagai asesoris demokrasi yang terasa riak kehadirannya setiap lima tahun jelang dan pada saat pemilu atau pilkada, tetapi benar-benar dapat berkontribusi besar dalam konsolidasi demokrasi di tanah air.

5. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategik. Para manajer menurut David sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik; evaluasi strategi terutama berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah (2004:286). Evaluasi atau penilaian didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk membandingkan hasil yang senyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai dikaitkan dengan tujuan, sasaran, dan rencana dalam hal ini termasuk strategi sebagai produk proses perencanaan setelah suatu tahap tertentu dalam proses operasional dilalui (Siagian, 1995: 258).

Evaluasi strategi penting karena organisasi menghadapi lingkungan yang dinamis dengan faktor-faktor eksternal dan internal berubah dengan cepat dan dramatis. Sukses saat ini tidak menjamin sukses esok hari. Sebuah organisasi seharusnya tidak boleh puas terbuai dengan sukses. Tak terhitung perusahaan yang menikmati kemakmuran dalam satu tahun harus berjuang keras untuk dapat bertahan di tahun berikutnya. Terkait dengan ini, Alvin Toffler (dalam David, 2004:295), menyatakan bahwa lingkungan bisnis menjadi demikian dinamis dan kompleks sehingga

mengancam manusia dan organisasi dengan kejutan di masa depan, yang terjadi bila sifat, tipe, dan kecepatan perubahan melebihi kemampuan dan kapasitas individual atau organisasi. Evaluasi strategi meningkatkan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan sukses pada keadaan yang berubah.

Evaluasi strategi, termasuk di dalamnya pengawasan/pengendalian strategi, dalam kehidupan keseharian organisasi parpol tampaknya belum juga menjadi bagian dari aktivitas yang built-in dalam setiap gerak langkah dan riak organisasi. Padahal terdapat tuntutan publik untuk pembenahan yang integral komprehensif kepada segenap slagorde parpol di tengah fakta yang tak terbantahkan bahwa citranya saat ini di mata publik tengah mengalami kemerosotan sampai ke titik yang sangat mengkhawatirkan. Ini tidak terlepas dari makin maraknya aksi-aksi korupsi dengan segala bentuknya yang dilakukan oleh sebagian anggota/kader parpol, baik yang berada di lembaga eksekutif maupun legislatif, termasuk yang berada di berbagai daerah.

Kenyataannya, evaluasi yang dilakukan lebih banyak terfokus pada bagian akhir dari proses ritual politik lima tahunan, seperti pemilu (pileg dan pilpres) dan pilkada yang hanya berkutat pada deretan angka-angka raihan suara atau kursi/jabatan publik. Jarang sekali dilakukan terhadap proses pengawasan/pengendalian yang akurat pada saat sumber-sumber daya organisasi dimobilisasi, misalnya, ketika pemilu/pilkada berlangsung. Demikian pula perhelatan rutin parpol sebagai puncak aktivitas organisasi (kongres, muktamar atau nama lainnya) tidak selalu menjadi momentum strategis untuk mengoreksi secara total berbagai kesalahan atau kekurangan yang terjadi. Publik justru acapkali disuguhkan pemandangan rebutan posisi-posisi strategis yang didalamnya diwarnai berbagai intrik yang justru kontraproduktif bagi lahirnya postur parpol sebagai organisasi modern. Padahal, aktivitas fact finding yang dilakukan pada tahap ini merupakan entrypoint sangat penting bagi berjalannya tahap evaluasi strategi secara tepat, sehingga benar-benar konstruktif bagi lahirnya sosok parpol yang berkeunggulan kompetitif.

6. Prospek

Harapan munculnya sosok parpol yang kinerjanya benar-benar diorientasikan hanya untuk kepentingan publik merupakan sesuatu yang tidak terbantahkan lagi. Efektivitas parpol

sebagai organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya menjadi agenda besar dan mendasar dalam penataan parpol sebagai bagian dari pembangunan politik saat ini. Dengan kata lain, efektivitas organisasi merupakan faktor penting dalam terus mendorong konsolidasi demokrasi saat ini. Untuk dapat tampil dengan sosok seperti yang diharapkan tersebut, maka penerapan manajemen strategik merupakan suatu keniscayaan.

Seluruh slagor deparpol ditantang dan dituntut untuk dapat mewujudkan penerapan manajemen strategik ini dalam setiap gerak langkahnya, melalui operasionalisasi fungsi-fungsinya instrumentalnya sebagai pengusung aspirasi rakyat, serta dengan komitmen dan kesungguhan untuk menjadikan parpol tempatnya bernaung sebagai organisasi modern. Berbagai perangkat regulasi yang sedang berlaku dan yang akan terbit terkait keberadaannya tak lebih hanyalah pemenuhan dimensi formal yuridis bagi proses konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung. Faktor penentu yang paling besar bagi penerapan manajemen strategik adalah *innerwill* yang ditunjukkan oleh segenap manajer/petinggi parpol di semua level organisasi tanpa kecuali. Prospek konsolidasi demokrasi tampaknya masih mengandung optimisme terutama dengan melihat kontrol publik yang selalu mengiringi setiap langkah institusi politik, termasuk parpol. Dengan itu pula prospek penerapan manajemen strategik pada parpol di era demokratisasi saat ini tampaknya masih mengandung secercah harapan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran parpol dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting, karena hal ini berkaitan dengan upaya mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam kaitan ini, kemampuan dirinya sangat dipertaruhkan dalam mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Keberadaan strategi yang tepat sebagai respon terhadap hal tersebut dipandang sangat menentukan bagi pelaksanaan fungsi-fungsinya sebagai pilar demokrasi. Oleh karenanya, penerapan manajemen strategik pada dirinya akan sangat mendorong lahirnya sosok parpol yang berkeunggulan kompetitif. Dalam kenyataannya, penerapan manajemen strategik dalam setiap gerak langkah parpol masih dihadapkan kepada berbagai tantangan dan permasalahan, baik internal maupun eksternal. Kemauan serius segenap manajer/petinggi parpol pada semua level organisasi parpol tanpa kecuali untuk berubah sesuai tuntutan publik akan

memperkokoh eksistensinya. Dengan demikian, hal ini akan memberi penguatan pada konsolidasi demokrasi yang saat ini tengah berlangsung.

Hal yang direkomendasikan antara lain agar parpol selalu responsif dan adaptif terhadap setiap gerak perkembangan lingkungan, khususnya tuntutan publik. Revisi terhadap visi dan misi organisasi yang umumnya tergambar pada tujuan, fungsi atau program serta aspek organisasi lainnya yang termuat dalam anggaran dasarnya perlu terus dilakukan sejalan dengan dinamika organisasi. Peningkatan kualitas anggota atau kader parpol, termasuk yang dipersiapkan menempati jabatan publik merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan. Evaluasi terhadap berbagai langkah organisasi dalam kerangka manajemen strategik harus terus menerus dilakukan sehingga parpol mendapatkan keunggulan kompetitif.

REFERENSI

- Ansoff, H. Igor dan Edward J. Mc Donnell. 1990. *Implanting Strategic Management. Second Edition*. York: Prentice Hall.
- Apter, David E. 1996. *Pengantar Analisa Politik (Penerjemah: Setiawan Ahadi)*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Arfani, Riza, Noer (Editor). 1996. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ball, Alan R. 1975. *Modern Politic and Government*. London: The McMillan Press. Ltd.
- Blau, Peter M. dan M. W. Mayer. 2000. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern (terjemahan)*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Blondel, J. 1995. *Comparative Government. An Introduction. Second Edition*. London: Prentice Hall Harvester Wheatsheaf.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cooper, Philip J. dkk, 1998. *Public Adminstration ForTheTwenty First Century*. Fort Worth: Harcourt Brace College Publisher.
- David, Fred R.. 2004. *Manajemen Strategis. Edisi Ketujuh. Versi Bahasa Indonesia (Penerjemah : Alexander Sindoro)*. Jakarta: PT Indeks.
- Dahl, Robert A. 1982. *Dilema Demokrasi Pluralis. Antara Otonomi dan Kontrol (Penerjemah: Sahat Simamora)*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Deutsch, Karl. W. 1999. *Politics and Government. How People Decide Their Fate*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Dirgantoro, Crown. 2004. *Manajemen Stratejik. Konsep, Kasus dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Hadi Soetrisno. 1989. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Harrison, Frank. 1986. *Policy, Strategy, and Managerial Action*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Hitt, Michael A., R. Duane Ireland dan Robert E. Hoskisson. 2001. *Manajemen Strategis. Daya Saing dan Globalisasi*. Konsep. (Terjemahan). Jakarta: Salemba Empat.
- Howlett, M & M. Ramesh. 1995. *Studying Policy Cycles and Policy Subsystem*. Toronto: Oxford University Press.
- Hughes, Owen E. 1994. *Public Management and Administration. An Introduction*. New York: ST Martins Press Inc.
- Hunger, J. David, dan Thomas L. Wheelen. 1996. *Manajemen Strategis (Penerjemah: Julianto Agung S.)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Huntington, Samuel P., 2002. *Gelombang Demokratisasi Ketiga (Penerjemah: Asril Marjohan)*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Krippendorff, Klaus. 1993. *Analisis Isi, Pengantar Teori dan Metodologi. (Alih Bahasa: Farid Wajidi)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Klingenmann, Hans-Dieter dkk. 2000. *Partai, Kebijakan dan Demokrasi (Penerjemah: Sigit Jatmika)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mariana, Dede dan Caroline Paskarina. 2008. *Demokrasi & Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia. Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- McMillan, J. H. And Schumacher S. 1989. *Research in Education. A Conceptual Introduction*. Harper. Collins Publisher.
- Meehan, Eugene J. dkk. 1966. *The Dynamics of Modern Government*. Tokyo: McGrew Hill. Kogakusha Ltd.
- Michael, Ewen J. 2006. *Public Policy. The Competitive Framework*. Oxford University Press.
- Nanus, Burt 2001. *Kepemimpinan Visioner. Menciptakan Kesadaran Akan Arah dan Tujuan di Dalam Organisasi (Penerjemah: Frederik Ruma)*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Narayanan, V. K. dan Raghu Nath. 1993. *Organization Theory. A Strategic Approach*. Boston: Richard D. Irwin, Inc.
- Nasution S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Post, James E., Anne T. Lawrence dan James Weber. 1999. *Business and Society. Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*. Boston: Irwin MCGraw-Hill.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1997. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Robbins, Stephen P. 1990. *Organization Theory. Structure, Design, and Applications. Third Edition*. London: PrenticeHallInternational, Inc.
- Rodee, CarltonClymerdkk. 2008. *Pengantar Ilmu Politik (Penerjemah: Zulfikly Hamid)*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Siagian, Sondang P. 1993. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Siagian, Sondang P. 1995. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Solihin, Ismail. 2012. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Usmara, U. (Editor). 2007. *Implementasi Manajemen Strategik: Kebijakan dan Proses*. Yogyakarta: Amara Books.
- Wheelen, Thomas L. dan J. David Hunger. 1995. *Strategic Management and Business Policy. Fifth Edition*. California: Addison-Wesley Publishing Company.
- TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik